

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

3.1.1. FUNGSI PENUNJANG

3.1.1.1 Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dialokasikan anggaran Rp79.772.508.154,00 dengan realisasi keuangan Rp72.835.615.576,00 (91,30%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 Program, 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Perjanjian Kinerja					Program Pendukung
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2 %	-6,45 %*	-89,58%*	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,50	B = 85,97	105,49%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,50	A = 80,15	92,66%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Ket: * angka masih bisa berubah

2. Capaian Kinerja Urusan Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN			100%	100	79.772.508.154,00	72.835.615.576,00	91,30

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100	77.084.628.874,00	70.621.447.736,00	91,62
A.	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	198.401.000,00	188.919.000,00	95,22
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen (Renja, Renstra, RKA/DPA Awal, RKA/DPA Perubahan	6 dokumen (Renja, Renstra, RKA/DPA Awal, RKA/DPA Perubahan	100	15.731.000,00	11.725.000,00	74,53
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	3 dokumen (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	100	7.320.000,00	7.155.000,00	97,75
3.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100	17.110.000,00	13.625.000,00	79,63
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	18 laporan	18 laporan	100	158.240.000,00	156.414.000,00	98,85
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100	48.663.524.703,00	44.147.295.727,00	90,72
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 orang/ bulan	205 orang/ bulan	100	46.994.244.527,00	42.594.613.948,00	90,64

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	1.665.512.176,00	1.551.131.779,00	93,13
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SKPD	12 laporan	12 laporan	100	3.768.000,00	1.550.000,00	41,14
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
8.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100	28.800.000,00	0,00	0,00
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	100	28.800.000,00	0,00	0,00
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	13.242.832.107,00	12.508.188.362,00	94,45
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100	41.205.200,00	40.421.300,00	98,10
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	25 paket	100	453.352.200,00	436.119.000,00	96,20
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	904.556.326,00	842.127.572,00	93,10
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	2.525.369.428,00	2.458.395.288,00	97,35

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100	66.094.000,00	59.961.000,00	90,72
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100	7.601.688.853,00	7.068.068.278,00	92,98
16.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.650.566.100,00	1.603.095.924,00	97,12
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100	1.586.642.400,00	1.230.978.900,00	77,58
17.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	334.687.400,00	303.141.000,00	90,57
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 unit	10 unit	100	1.066.533.000,00	821.277.900,00	77,00
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 unit	1 unit	100	185.422.000,00	106.560.000,00	57,47
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasapenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	10.937.655.653,00	10.322.815.328,00	94,38
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	4.254.522.601,00	3.965.157.352,00	93,20
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	100	6.680.633.052,00	6.355.157.976,00	95,13

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kantor Yang Disediakan						
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100%	100%	100	2.170.473.011,00	2.012.053.383,00	92,70
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100	817.056.000,00	722.534.487,00	88,43
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	80 unit	80 unit	100	436.950.000,00	392.394.800,00	89,80
25.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100	753.886.000,00	749.597.350,00	99,43
26.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 unit	15 unit	100	122.249.861,00	109.352.746,00	89,45
27.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100	40.331.350,00	38.174.000,00	94,65
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	7,2%	-6,45%	-89,58%	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	Rp2.807.443. 163.516,00	Rp2.752.690. 753.329,92	98,05	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
28.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	43.982.000,00	34.201.000,00	77,76
29	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah Dan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	54.660.000,00	37.195.000,00	68,05

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	700.680.000,00	444.598.000,00	63,45
31.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	749.994.500,00	703.725.000,00	93,83
32.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	297.923.780,00	274.144.000,00	92,02
33.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah Dokumen Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	10.620.000,00	3.910.000,00	36,82
34.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP Yang Memiliki Piutang Pajak	18 dokumen SSPD	18 dokumen SSPD	100	657.664.000,00	612.519.840,00	93,14
35.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	18 laporan	18 laporan	100	60.230.000,00	34.260.000,00	56,88
36.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	12 laporan	12 laporan	100	28.875.000,00	24.105.000,00	83,48
37.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	100	83.250.000,00	45.510.000,00	54,67

Dalam melaksanakan program/kegiatan ditemukan permasalahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.** Program ini didukung alokasi anggaran Rp77.084.628.874,00 dengan realisasi keuangan 91,62%, terdiri dari delapan kegiatan yang seluruhnya mendukung Indikator capaian program yaitu Persentase ketercapaian

penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan permasalahan sebagai berikut:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, tidak ada masalah
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu : mutasi pegawai terutama terhadap pengelola keuangan berpengaruh terhadap aktifitas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan.
Upaya yang dilakukan: perlu mempertimbangkan adanya mutasi pegawai terhadap jabatan pengelola keuangan.
- 3) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, tidak ada masalah.
- 4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** tidak ada masalah.
- 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, tidak ada masalah.
- 6) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu: masih ada barang yang tidak memenuhi persyaratan TKDN dalam perencanaan.
Upaya yang dilakukan perlu seleksi terhadap perencanaan barang yang diusulkan dalam pengadaan.
- 7) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, tidak ada masalah.
- 8) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
 1. Data aset belum lengkap dan tidak mutakhir.
 2. Aset daerah belum dimanfaatkan secara optimal.
 3. Masih banyak aset yang tidak layak pakai atau rusak belum dihapuskan.Upaya yang dilakukan :
 1. Melakukan inventarisasi aset secara berkala.
 2. Membuat SOP pemeliharaan asset.
 3. Segera dilakukan penghapusan aset yang tidak layak pakai.

b. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**. Program ini didukung alokasi anggaran Rp2.687.879.280,00 dengan realisasi keuangan 82,38%, terdiri dari satu kegiatan yang seluruhnya mendukung indikator capaian program yaitu besaran target pajak daerah yang harus dicapai, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, dengan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:
 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah
 2. Adanya tunggakan pajak dari tahun ke tahun sebelumnya
 3. Data objek pajak belum mutakhir
 4. Keterbatasan SDM untuk melakukan survei lapangan

Upaya yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi pajak secara rutin
2. Intensifikasi penagihan dengan surat teguran dan kerjasama dengan HPH
3. Pemutakhiran data pajak berbasis GIS dengan Kerjasama dikelurahan dan kecamatan
4. Menggunakan aplikasi mobile untuk input data lapangan

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. **Sasaran I** : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan PAD dengan capaian kinerja -106,67%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan outcome presentase peningkatan PAD, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - (1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan output : jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah sebanyak 2 dokumen.
 - (2) Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan output : jumlah laporan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah sebanyak 1 laporan.
 - (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan output jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 1 laporan.
 - (4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan output : jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah sebanyak 1 laporan.
 - (5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan output : jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah sebanyak 1 laporan.
 - (6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak dengan output: jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak sebanyak 18 dokumen SSPD.

- (7) Penagihan Pajak Daerah dengan output : jumlah dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah sebanyak 1 dokumen SSPD.
- (8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan output : jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah sebanyak 18 laporan.
- (9) Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan output : jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 12 laporan.
- (10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan output : jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebanyak 1 laporan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari keempat sumber PAD tersebut, yang menjadi core bisnis Badan Pendapatan Daerah adalah pajak daerah. Sementara itu retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah berada pada OPD pemungut penerimaan sedangkan Bapenda hanya berperan sebagai fungsi koordinasi saja.

Pada tahun 2025, terjadi penurunan persentase peningkatan PAD dari tahun 2024 yaitu dari 5,67% menjadi -6,45% dengan capaian kinerja sebesar -89,58%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi PAD tahun 2024 dibandingkan dengan target PAD tahun 2025.

Realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai 97,07% dari target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka terdapat penurunan pendapatan pajak daerah sebesar Rp281.801.900.410,25 sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
1.	Pajak Daerah	2.118.471.018.085,00	2.056.311.024.853,75	97,07	2.338.112.925.264,00

Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi mengalami penambahan dari 5 macam menjadi 7 macam yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok
6. Pajak Alat Berat (PAB)
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Perbandingan realisasi masing-masing komponen pajak daerah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan Realisasi PKB Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	600.341.827.516,00	574.578.217.050,00	95,71	844.845.392.450,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	260.000.000.000,00	297.951.805.000,00	114,60	398.873.654.800,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745.000.000.000,00	705.559.525.853,00	94,71	638.993.534.545,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	14.448.745.350,00	12.008.128.811,00	83,11	14.677.021.417,00
Pajak Rokok	481.021.225.529,00	455.543.870.617,00	94,70	443.723.322.052,00
Pajak Alat Berat (PAB)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15.659.219.690,00	10.669.477.522,75	68,14	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing komponen pendapatan pajak daerah tahun 2025.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target penerimaan PKB tidak tercapai merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru dibanding tahun sebelumnya sebagaimana menurunnya penjualan kendaraan baru secara nasional. Dari data Kemenperin dan Gaikindo, hingga November 2025, penjualan mobil baru hanya berada di kisaran 710.000 unit, turun hampir 10% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu kondisi perekonomian masyarakat yang sepenuhnya belum pulih dan bencana yang terjadi di akhir tahun 2025 pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan PKB.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Capaian realisasi pajak BBNKB tahun 2025 terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan (114,60%). Salah satu penyebabnya adalah adanya penurunan target BBNKB pada APBD Perubahan 2025.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak tercapai merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Disamping itu tingginya penjualan mobil listrik secara nasional pada tahun 2025 juga mempengaruhi konsumsi BBM, dimana hingga November 2025 mencapai 82.525 unit dari total penjualan kendaraan nasional 710.084 unit, atau berada di level 11,62%.
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
Penurunan penerimaan PAP disebabkan karena konsumen atau industri beralih menggunakan air bawah tanah atau sumber air lainnya yang lebih murah dan mudah diakses. Beberapa pelaku industri mulai beralih menggunakan teknologi hemat air sehingga mengurangi konsumsi air permukaan.
- e. Pajak Rokok
Realisasi Pajak Rokok dibawah target yang telah ditetapkan merupakan salah satu dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal yaitu rokok tanpa cukai yang menjadi alternatif rokok murah bagi konsumen. Selain itu kenaikan harga rokok yang tinggi akibat cukai dan pajak membuat konsumen beralih ke produk lain seperti rokok tanpa tembakau/herbal atau mengurangi pembelian rokok legal.
Pajak rokok merupakan given dari pusat dimana realisasinya tergantung terhadap penerimaan cukai rokok nasional, dimana saat ini penerimaan cukai rokok nasional melemah.
- f. Pajak Alat Berat (PAB)
Pemungutan pajak alat berat pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan secara optimal atau penuh karena beberapa kendala, terutama terkait dengan penetapan regulasi turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 belum ada terutama petunjuk teknisnya.
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Opsen (tambahan) dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh kabupaten/kota, namun pelimpahan penerimaannya menjadi bagian dari penerimaan provinsi/kabupaten/kota, dimana tarif opsen MBLB ditetapkan sebanyak 25% dari pajak MBLB terutang yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten/kota tempat pengambilan MBLB dilakukan. Tahun 2025, opsen MBLB terealisasi sebesar 66,70% dari target yang ditetapkan. Untuk optimalisasi penerimaan opsen MBLB ini diharapkan peningkatan koordinasi dan sinergi antara Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas ESDM serta Bapenda/Badan Keuangan Daerah Kabupaten/kota se Sumatera Barat secara maksimal.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang menjadi indikator Gubernur yang dibebankan

kepada Bapenda Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana tahun 2025 dari target 40,75% yang ditetapkan terealisasi sebesar 44,42% dengan capaian kinerja sebesar 109,01%.

Formulasi penghitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

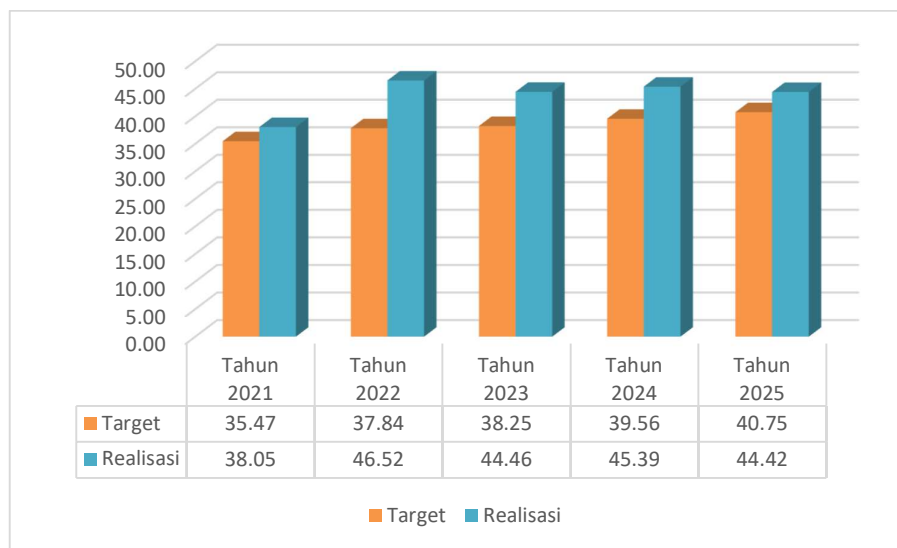
$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2025}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Rp. 2.752.690.753.329,92}}{\text{Rp. 6.196.761.525.955,92}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = 44,42\%$$

Pada grafik berikut dapat dilihat realisasi pengukuran indikator kinerja kunci Bapenda yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dimana terjadi peningkatan setiap tahun dari target yang telah ditetapkan.

Grafik. Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Sumber data: data diolah

Berdasarkan kapasitas fiskal daerah atau kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membagi 38 provinsi di Indonesia menjadi lima kategori peta kapasitas fiskal daerah yaitu kapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Menurut PMK Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Sumatera Barat berada pada kelompok daerah kapasitas fiskal rendah dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,535 menempati peringkat ke-22 dari 38 provinsi se Indonesia. Sedangkan tahun 2024 Provinsi

Sumatera Barat berada pada peringkat 35 dari 38 provinsi (PMK Nomor 65 Tahun 2024). Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lemah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya tidak cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja pemerintah sehingga dibutuhkan berbagai upaya agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

Namun jika dilihat dari data persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun 2025 yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 10 dari 38 provinsi se Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.

Gambar. Infografis Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2025



Sumber Data : Laporan 38 Pemrov untuk LRA per 23 Desember 2025 (Data Diliat), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA.2025

14

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berhasil mengumpulkan pendapatan sesuai target atau mendekati target yang ditetapkan. Namun dengan rasio kapasitas fiskal yang rendah mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan yang dikumpulkan dengan beban kewajiban atau pengeluaran yang harus ditanggung. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Beban pengeluaran yang tinggi. Meskipun pendapatan yang masuk banyak, pengeluaran pemerintah provinsi (untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dll) juga sangat tinggi.
2. Ketergantungan pada dana transfer. Pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 postur pendapatan transfer mencapai 54,54% dari seluruh total pendapatan daerah.
3. Penurunan target PAD pada APBD Perubahan Tahun 2025.

Tahun 2025 capaian indikator kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terealisasi sebesar -6,45% dari target 7,2% yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

- I. Kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah yang meliputi:
 1. Peningkatan pengawasan dan penagihan aktif.
 2. Melakukan pemutakhiran data potensi kendaraan yang wajib membayar pajak melalui kegiatan penagihan kendaraan yang tidak mendaftar ulang (TDU), yang dilakukan dalam bentuk penyampaian surat peringatan kepada wajib pajak secara *door to door* dan sekaligus mendata status kendaraan yang ada (apakah masih ada atau sudah bertukar kepemilikannya).
 3. Kegiatan razia bersama dan kerjasama dengan kepolisian.
 4. Peningkatan pelayanan dan inovasi digital optimalisasi penggunaan aplikasi Signal.
 5. Layanan Samsat Keliling dan Mobil Samsat.
 6. Sosialisasi dan edukasi wajib pajak kepada masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan pelajar.
 7. Kampanye taat pajak melalui media sosial, radio, media cetak, dan video pendek.
 8. Layanan Samsat Malam Minggu.
 9. Layanan Samsat Minggu Pagi/*car free day*.
 10. Layanan Samsat Nagari.
 11. Peningkatan SDM tenaga IT Bapenda Provinsi Sumatera Barat.
 12. Peningkatan kepatuhan ASN Provinsi Sumatera Barat untuk taat pajak.
 13. Pengawasan pemanfaatan air permukaan oleh Perusahaan dan pelaku usaha.
 14. Melakukan rapat koordinasi (*coaching*) bersama OPD penghasil retribusi daerah.
 15. Menerbitkan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-343-2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;

- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-544-2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-343-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 30 September 2025; dan
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 30 Desember 2025.

II. Kegiatan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang meliputi:

1. Peningkatan sinergi antar instansi untuk pemungutan pajak daerah.
2. Peningkatan sinergi antar instansi untuk program ASN taat pajak.
3. Percepatan pelaksanaan ETPD (Transaksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi ETPD Povinsi Sumatera Barat.
5. Peninjauan ulang tarif dan jenis retribusi daerah sesuai dengan Perda terbaru.
6. Pemanfaatan aset dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.
7. Optimalisasi BUMD untuk menghasilkan dividen.
8. Kerjasama pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif.
9. Peningkatan sinergi antar instansi.
10. Integritasi data dengan instansi vertikal (Ditjen Pajak, Korlantas, dan Pertamina).
11. Mendorong OPD pengelola retribusi untuk menambah cakupan dan efektifitas pemungutan.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan masih dalam masa pemulihan pasca bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam pada triwulan IV tahun 2025 di beberapa sentra

wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak dengan adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
6. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Upaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang adalah:

1. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
 - a. Optimalisasi digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah diantaranya dengan mengembangkan payment point system dengan bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah seperti Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Car Free Day*, Samsat Gerai, Samsat Terminal, Samsat Wisata, Samsat *Week End*, Samsat MPP, Samsat Malam Minggu dalam rangka memberikan layanan.
 - b. Mengoperasikan kantor-kantor SAMSAT Nagari diseluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.
 - c. Optimalisasi Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT.
 - e. Sinergi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen MBLB, dalam bentuk pendanaan bersama, pendataan, penagihan dan sosialisasi secara bersama-sama.
 - f. Melakukan pemutakhiran dan integrasi data objek pajak.
 - g. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh Kepala UPTD berupa coaching clinic.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.

3. Terus melakukan pengembangan inovasi dalam pelayanan pajak daerah.
 4. Melakukan pengelolaan kekayaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, seperti sewa tempat/gedung dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanannya.
 5. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendapatkan deviden yang optimal.
- b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 105,49%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan outcome persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

a) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan output : jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 12 paket.
- (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output : jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 25 paket.
- (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output : jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 3 paket.
- (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output : jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket.
- (5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output : jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 12 dokumen.
- (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output : jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.
- (7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan output : jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen.

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- (1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dengan output : persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebanyak 1 paket.
 - (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output : jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 10 unit.
 - (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output : jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 1 unit.
- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output: jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan.
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output: jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan.
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output: jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan.
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 1 unit.
 - (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output : Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara sebanyak 11 unit.
 - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output : jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 80 laporan.
 - (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 15 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap wajib pajak. Pada tahun 2025, pelaksanaan survei dilakukan pada 4 (empat) UPTD yaitu sebagai berikut:

Tabel. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	UPTD Sarilamak	84,58	B	Baik
2.	UPTD Sijunjung	87,97	B	Baik
3.	UPTD Padang Panjang	85,44	B	Baik
4.	UPTD Lubuk Basung	85,87	B	Baik
Rata-rata		85,97	B	Baik

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik diantaranya adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Adanya mekanisme pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pajak diantaranya melalui aplikasi SP4N-Lapor, sehingga setiap pengaduan yang ada dapat ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin.
2. Selain itu Bapenda Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan sarana tanya jawab di media sosial instagram, twitter, facebook maupun you tube.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung untuk pelayanan pajak, baik untuk operasional maupun untuk wajib pajak terutama wajib pajak disabilitas.
2. Waktu pelayanan masih belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan.
3. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih kurang dalam menjalankan pelayanan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Perlunya optimalisasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan pajak baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan SDM pengelola pajak daerah baik melalui pelatihan/bimbingan teknis terutama bagi petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3. Selalu menindaklanjuti pengaduan yang ada demi kenyamanan dan kelancaran pembayaran pajak.

c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian kinerja 92,66%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan outcome persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output : jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 dokumen, yaitu Renja, Renstra, RKA/DPA Awal, RKA/DPA Perubahan.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD dengan output : jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan, yaitu LKjIP, LKPJ dan LPPD

(3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output : jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan sebanyak 1 berita acara.

(4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 18 laporan.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 205 orang/bulan.

(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan output : jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen.

- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan output : jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ SKPD sebanyak 12 laporan.
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - (1) Pengamanan Barang Milik Daerah dengan output : jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD sebanyak 2 dokumen.
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output : jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 6 orang.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD adalah sebagai berikut:

Faktor pendorong yaitu:

1. Meningkatnya komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.

Faktor penghambat yaitu:

1. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
2. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Keterbatasan ASN dalam melakukan tugas yang ada dalam segi kuantitas sehingga masih ada satu orang merangkap lebih dari satu jabatan, khususnya pada UPTD/Samsat yang tersebar di 18 Kabupaten/kota.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Berupaya selalu mendokumentasikan setiap laporan capaian indikator kinerja dari level atas sampai level bawah.
2. Memaksimalkan pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi, diantaranya dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
3. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan pegawai baru/CPNS dan pemindahan PNS dari kabupaten/kota untuk ditempatkan pada UPTD/Samsat setempat.

Ketiga sasaran yang sudah dituangkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.